



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

PENGUMUMAN

Nomor 3/SEK/PENG.KP1.1/I/2026

TENTANG

**SELEKSI JABATAN FUNGSIONAL PERBENDAHARAAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN LAIN PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA TAHUN 2026**

Berkenaan dengan surat Pengumuman Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PENG-2/PB.7/2026 tanggal 13 Januari 2026 tentang Seleksi Perpindahan Dari Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Periode I - Tahun 2026, dengan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam JF APK APBN dan JF PK APBN Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan:

1. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
2. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2026 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja dan Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
4. Surat Menteri PAN-RB Nomor B/3/M.SM.02.01/2024 tentang Perpindahan Jabatan Fungsional dan Uji Kompetensi.



B. RUANG LINGKUP

Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Perbendaharaan Tahun 2026 terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

C. KEBUTUHAN JABATAN

Jabatan	Jenjang	Jumlah
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Terampil / Mahir / Penyelia	567

Rincian kebutuhan formasi jabatan sebagaimana tercantum pada **Lampiran I**.

D. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum

Calon Peserta yang akan mengikuti seleksi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- berstatus PNS;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- berijazah paling rendah D-3 (Diploma Tiga) di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, atau bidang lain yang relevan;
- memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 2 (dua) tahun (bersifat akumulatif) sejak tanggal 1 Januari 2016;
- memiliki predikat kinerja paling rendah Baik pada periode penilaian kinerja tahun 2024 dan tahun 2025;
- tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat dan/atau tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- tidak sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
- tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara pada saat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi;
- memiliki pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c;

- k. pada saat pendaftaran berusia paling tinggi 51 tahun bagi calon Peserta yang akan diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN;
- l. **sedang ditugaskan dan/atau sedang menduduki jabatan** dalam sub unsur Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN sebagai Bendahara (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu);
- m. memiliki dokumen Penetapan Angka Kredit yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi.

2. Persyaratan Khusus

- a. Hanya dapat dilamar oleh pelaksana atau pejabat fungsional;
- b. Calon Peserta berkedudukan di satuan kerja sesuai kebutuhan formasi jabatan;
- c. Satuan kerja sesuai kebutuhan formasi jabatan dapat mengusulkan lebih dari 1 (satu) calon peserta, keputusan akhir akan dipertimbangkan melalui hasil Uji Kompetensi dan pertimbangan Tim Baperjakat;
- d. Calon Peserta yang memiliki kualifikasi Pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum, sebagaimana pada **Lampiran II** ditambahkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN paling singkat 4 (empat) tahun (bersifat akumulatif) sejak tanggal 1 Januari tahun 2016;
 - 2) memiliki portofolio sertifikat pelatihan di bidang pengelolaan keuangan APBN paling sedikit 2 (dua) sertifikat yang diperoleh/diterbitkan terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2020.

E. DOKUMEN PERSYARATAN

Dokumen yang harus dilampirkan bagi Calon Peserta yang akan mengikuti Seleksi Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Perbendaharaan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Dokumen persyaratan utama:
 - a. Surat Pengangkatan PNS;
 - b. Surat Keputusan Pangkat terakhir;
 - c. Surat Keputusan Jabatan terakhir;

- d. Surat Keterangan dari **Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan)** yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki integritas dan moralitas yang baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat, tidak sedang menjalankan tugas belajar, tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara, dan tidak mengajukan permohonan pindah satuan kerja sesuai dengan format yang tercantum dalam **Lampiran III**;
- e. Surat Keterangan Sehat dari Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan sehat secara jasmani dan rohani;
- f. Ijazah pendidikan terakhir yang gelarnya telah tercantum dalam Surat Keputusan kepangkatan terakhir dan (wajib dilengkapi dengan Persetujuan Pencantuman Gelar dari Badan Kepegawaian Negara bagi yang pernah melakukan pencantuman gelar/penyesuaian ijazah);
- g. Surat Pernyataan dari **Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan)** sesuai **Lampiran IV** yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan APBN:
 - 1) paling singkat 2 (dua) tahun dalam hal memiliki kualifikasi pendidikan di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum; atau
 - 2) paling singkat 4 (empat) tahun dalam hal calon peserta seleksi memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum;
- h. Dokumen bukti pengalaman sebagai Pengelola Keuangan APBN antara lain: PPK, PPSPM, Bendahara, PPABP, Penyusun Laporan Keuangan atau Operator SAI, Verifikator Keuangan (staf Pengelola Keuangan) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2016, berupa:
 - 1) Surat Keputusan; dan/atau
 - 2) Surat Perintah;
- i. Salinan dokumen penilaian kinerja (SKP) tahun 2024 dan tahun 2025;

- j. Surat Keputusan atau Surat Perintah pengangkatan/penetapan sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu **yang masih berlaku**;
- k. Sertifikat Kompetensi BNT Pengeluaran / BNT Penerimaan **yang masih berlaku** bagi calon Peserta yang sedang ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran / Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai Surat Keputusan atau Surat Perintah pengangkatan/penetapan;
- l. Portofolio berupa 2 (dua) sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diterbitkan sejak tahun 2020 dalam hal calon peserta seleksi memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum;
- m. Penetapan Angka Kredit yang telah ditandatangani oleh atasan langsung yang dihitung sampai dengan predikat kinerja terakhir pada saat diusulkan Uji Kompetensi.

F. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. Pimpinan atau Kepala Satker memastikan sudah terdapat 1 (satu) orang PNS yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang kepegawaian untuk menjadi Admin Satker pada *e-Jafung*;
- b. Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, dan/atau calon Peserta tidak dapat merangkap sebagai Admin Satker pada *e-Jafung*;
- c. Apabila diperlukan perubahan *user* admin satker, Kepala Satker dapat melakukan penggantian dengan berkoordinasi dan mengajukan formulir pendaftaran admin satker baru kepada **KPPN mitra kerja** sesuai dengan format yang tercantum dalam **Lampiran V**;
- d. Admin Satker melakukan perekaman *user* calon Peserta bagi calon Peserta dari jabatan lain yang belum memiliki *role user* pada *e-Jafung*;
- e. Calon Peserta yang sudah memiliki *role user* dapat masuk pada *e-Jafung*, memastikan data *profile* telah sesuai, dan melengkapi dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf E dengan mengisi seluruh *form* pendaftaran pada *e-Jafung*, **mengunggah dokumen sesuai dengan kolom input yang disediakan**, dan selanjutnya mengajukan usulan kepada Admin Satker;

- f. Pimpinan Unit Kerja (dhi. Admin Satker pada *e-Jafung*) melakukan verifikasi berkas usulan pendaftaran seluruh calon Peserta pada lingkup Satuan Kerja masing-masing, untuk selanjutnya:
- 1) mengembalikan kepada calon Peserta untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan dalam hal berkas usulan belum sesuai; atau
 - 2) meneruskan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (dhi. Admin K/L pada *e-Jafung*) dalam hal berkas usulan telah lengkap dan benar;
- g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (dhi. Admin K/L pada *e-Jafung*) melakukan verifikasi berkas usulan pendaftaran calon Peserta pada lingkup Kementerian Negara/Lembaga masing-masing, untuk selanjutnya:
- 1) mengembalikan kepada calon Peserta untuk dilengkapi atau dilakukan perbaikan dalam hal berkas usulan belum sesuai; atau
 - 2) meneruskan kepada Unit Penyelenggara dalam hal berkas usulan telah lengkap dan benar.

G. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PERPINDAHAN JABATAN

Seleksi Perpindahan Jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Perbendaharaan Tahun 2026 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembuatan <i>user e-Jafung</i> calon Peserta seleksi perpindahan jabatan oleh Admin Satker <i>e-Jafung</i>	26 Januari s.d 30 Januari 2026 Pukul 16.30 WIB
2.	Perekaman berkas pendaftaran dan pengajuan usulan oleh calon Peserta melalui aplikasi <i>e-Jafung</i>	
3.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pimpinan Unit Kerja (<i>role user</i> Admin Satker) dan pengajuan usulan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga (<i>role user</i> Admin K/L) melalui aplikasi <i>e-Jafung</i>	

4.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga (<i>role user</i> Admin K/L) dan Pengajuan usulan kepada Unit Penyelenggara Uji Kompetensi melalui aplikasi <i>e-Jafung</i>	26 Januari s.d. 30 Januari 2026 Pukul 22.00 WIB
5.	Proses verifikasi berkas usulan calon Peserta oleh Unit Penyelenggara Uji Kompetensi	2 s.d. 13 Februari 2026
6.	Pengumuman Peserta Uji Kompetensi	diumumkan kemudian
7.	Pelaksanaan Uji Kompetensi	diumumkan kemudian
8.	Penyampaian rekomendasi Pengangkatan	diumumkan kemudian

H. LAIN-LAIN

- 1) Petunjuk penggunaan aplikasi *e-Jafung* bagi calon Peserta, Admin Satker, dan Admin K/L sebagaimana tercantum dalam <http://tiny.cc/JuknisEjafung>;
- 2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perbendaharaan dalam rangka perpindahan jabatan dilaksanakan menggunakan aplikasi *e-Jafung*;
- 3) Calon Peserta **wajib** memastikan **golongan dan pendidikan pada aplikasi GPP Pusat sudah sesuai dengan kondisi terkini** sebelum pembuatan *user* oleh Admin Satker;
- 4) Calon Peserta **wajib** mengupload dokumen pada aplikasi *e-Jafung* sesuai dengan kolom inputan yang disediakan, kesalahan pemilihan kolom inputan *upload* dokumen akan **otomatis menggugurkan** usulan pendaftaran calon peserta;
- 5) Penentuan jenjang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
- 6) Unit Penyelenggara tidak memungut biaya (**gratis**) terhadap seluruh proses penyelenggaraan seleksi perpindahan dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Perbendaharaan tahun 2026;
- 7) PNS yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi seleksi perpindahan jabatan ini **tidak diperkenankan** untuk mengajukan pindah satuan kerja;
- 8) Keputusan Panitia bersifat **final, mengikat dan tidak dapat diganggu gugat**;



- 9) Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait proses seleksi, dapat mengakses link <https://jafung-perbendaharaan.info/link/perpindahan> dan/atau menghubungi **HAI Kemenkeu** (*call center* : 14090, *e-mail* atau *tiket* : hai.kemenkeu.go.id dan/atau Bagian Administrasi Jabatan Fungsional Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi dengan nomor **WhatsApp** (085215108690).

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dipedomani.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2026

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Lampiran I

Pengumuman Sekretraris Mahkamah Agung

Nomor : 3/SEK/PENG.KP1.1/I/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

**RINCIAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNSIONAL PERBENDAHARAAN MELALUI MEKANISME PERPINDAHAN JABATAN
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
TAHUN 2026**

No	Satuan Kerja	Bendahara (Pengeluaran, Penerimaan, Pengeluaran Pembantu)
		Terampil / Mahir / Penyelia
i	Badan Pengawasan	
a	Sekretariat Badan Pengawasan	2
ii	Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	
b	Sekretariat Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	1
iii	Badan Urusan Administrasi	
c	Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	1
d	Biro Kepegawaian	1
e	Biro Kesekretariatan Pimpinan	1
f	Biro Keuangan	2
g	Biro Perencanaan dan Organisasi	2
h	Biro Perlengkapan	1
i	Biro Umum	1
iv	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	
j	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	1
v	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	
k	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	2
vi	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	
l	Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	1
vii	Kepaniteraan	
m	Sekretariat Kepaniteraan	1
A	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	
1	Pengadilan Negeri Banda Aceh	1
2	Pengadilan Negeri Lhoksukon	1
3	Pengadilan Negeri Lhokseumawe	1
4	Pengadilan Negeri Sigli	1
5	Pengadilan Negeri Tapaktuan	1
6	Pengadilan Negeri Kutacane	1
7	Pengadilan Negeri Idi	1
8	Pengadilan Negeri Sinabang	1

9	Pengadilan Negeri Singkil	1
10	Pengadilan Negeri Bireuen	1
11	Pengadilan Negeri Blangkajeren	1
12	Pengadilan Negeri Calang	1
13	Pengadilan Negeri Kuala Simpang	1
14	Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong	1
15	Pengadilan Negeri Blangpidie	1
16	Pengadilan Negeri Meureudu	1
17	Pengadilan Negeri Suka Makmue	1
B	Pengadilan Tinggi Medan	
18	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	1
19	Pengadilan Negeri Padangsidempuan	1
20	Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	1
21	Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	1
22	Pengadilan Negeri Simalungun	1
23	Pengadilan Negeri Pematang Siantar	1
24	Pengadilan Negeri Sibolga	1
25	Pengadilan Negeri Tarutung	1
26	Pengadilan Negeri Sidikalang	1
27	Pengadilan Negeri Balige	1
28	Pengadilan Negeri Mandailing Natal	1
29	Pengadilan Negeri Tanjung Balai	1
30	Pengadilan Negeri Sibuhuan	1
C	Pengadilan Tinggi Padang	
31	Pengadilan Negeri Bukittinggi	1
32	Pengadilan Negeri Painan	1
33	Pengadilan Negeri Batusangkar	1
34	Pengadilan Negeri Lubuk Basung	1
35	Pengadilan Negeri Tanjung Pati	1
36	Pengadilan Negeri Sawahlunto	1
37	Pengadilan Negeri Pulau Punjung	1
D	Pengadilan Tinggi Riau	
38	Pengadilan Negeri Bangkinang	1
39	Pengadilan Negeri Pelalawan	1
40	Pengadilan Negeri Bengkalis	1
41	Pengadilan Negeri Rokan Hilir	1
42	Pengadilan Negeri Rengat	1
43	Pengadilan Negeri Tembilahan	1
44	Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	1
45	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	1
E	Pengadilan Tinggi Jambi	

46	Pengadilan Negeri Sarolangun	1
47	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	1
48	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur	1
49	Pengadilan Negeri Muara Bungo	1
50	Pengadilan Negeri Tebo	1
51	Pengadilan Negeri Sungai Penuh	1
F	Pengadilan Tinggi Palembang	
52	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	1
53	Pengadilan Negeri Baturaja	1
54	Pengadilan Negeri Kayu Agung	1
55	Pengadilan Negeri Muara Enim	1
56	Pengadilan Negeri Sekayu	1
57	Pengadilan Negeri Pagar Alam	1
58	Pengadilan Negeri Prabumulih	1
59	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	1
G	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	
60	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	1
61	Pengadilan Negeri Tanjung Pandan	1
62	Pengadilan Negeri Koba	1
63	Pengadilan Negeri Mentok	1
H	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	
64	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	1
65	Pengadilan Negeri Batam	1
66	Pengadilan Negeri Natuna	1
I	Pengadilan Tinggi Bengkulu	
67	Pengadilan Negeri Curup	1
68	Pengadilan Negeri Manna	1
69	Pengadilan Negeri Bintuhan	1
70	Pengadilan Negeri Tubei	1
71	Pengadilan Negeri Mukomuko	1
J	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	
72	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	1
73	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	1
74	Pengadilan Negeri Liwa	1
75	Pengadilan Negeri Menggala	1
76	Pengadilan Negeri Kota Agung	1
77	Pengadilan Negeri Sukadana	1
78	Pengadilan Negeri Blambangan Umpu	1
K	Pengadilan Tinggi Bandung	
79	Pengadilan Negeri Bekasi	1
80	Pengadilan Negeri Bale Bandung	1

81	Pengadilan Negeri Cibinong	1
82	Pengadilan Negeri Depok	1
83	Pengadilan Negeri Sumber	1
84	Pengadilan Negeri Bogor	1
85	Pengadilan Negeri Subang	1
86	Pengadilan Negeri Ciamis	1
87	Pengadilan Negeri Garut	1
88	Pengadilan Negeri Purwakarta	1
89	Pengadilan Negeri Karawang	1
90	Pengadilan Negeri Cirebon	1
91	Pengadilan Negeri Indramayu	1
92	Pengadilan Negeri Cibadak	1
93	Pengadilan Negeri Sukabumi	1
94	Pengadilan Negeri Cianjur	1
95	Pengadilan Negeri Majalengka	1
96	Pengadilan Negeri Banjar	1
L	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	
97	Pengadilan Negeri Surakarta	1
98	Pengadilan Negeri Cilacap	1
99	Pengadilan Negeri Tegal	1
100	Pengadilan Negeri Kudus	1
101	Pengadilan Negeri Jepara	1
102	Pengadilan Negeri Kendal	1
103	Pengadilan Negeri Pekalongan	1
104	Pengadilan Negeri Purwodadi	1
105	Pengadilan Negeri Purworejo	1
106	Pengadilan Negeri Temanggung	1
107	Pengadilan Negeri Boyolali	1
108	Pengadilan Negeri Blora	1
109	Pengadilan Negeri Purbalingga	1
110	Pengadilan Negeri Brebes	1
111	Pengadilan Negeri Banjarnegara	1
112	Pengadilan Negeri Batang	1
113	Pengadilan Negeri Banyumas	1
M	Pengadilan Tinggi Surabaya	
114	Pengadilan Negeri Surabaya	1
115	Pengadilan Negeri Sidoarjo	1
116	Pengadilan Negeri Gresik	1
117	Pengadilan Negeri Jember	1
118	Pengadilan Negeri Banyuwangi	1
119	Pengadilan Negeri Malang	1

120	Pengadilan Negeri Tulungagung	1
121	Pengadilan Negeri Blitar	1
122	Pengadilan Negeri Lamongan	1
123	Pengadilan Negeri Tuban	1
124	Pengadilan Negeri Nganjuk	1
125	Pengadilan Negeri Jombang	1
126	Pengadilan Negeri Lumajang	1
127	Pengadilan Negeri Kraksaan	1
128	Pengadilan Negeri Bangil	1
129	Pengadilan Negeri Situbondo	1
130	Pengadilan Negeri Kota Madiun	1
131	Pengadilan Negeri Kepanjen	1
132	Pengadilan Negeri Bondowoso	1
133	Pengadilan Negeri Pamekasan	1
134	Pengadilan Negeri Trenggalek	1
135	Pengadilan Negeri Magetan	1
136	Pengadilan Negeri Ngawi	1
137	Pengadilan Negeri Bangkalan	1
138	Pengadilan Negeri Sampang	1
139	Pengadilan Negeri Sumenep	1
140	Pengadilan Negeri Probolinggo	1
N	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	
141	Pengadilan Negeri Kandangan	1
142	Pengadilan Negeri Pelaihari	1
143	Pengadilan Negeri Kotabaru	1
144	Pengadilan Negeri Amuntai	1
145	Pengadilan Negeri Tanjung	1
146	Pengadilan Negeri Marabahan	1
147	Pengadilan Negeri Batu Licin	1
O	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	
148	Pengadilan Negeri Sampit	1
149	Pengadilan Negeri Muara Teweh	1
150	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	1
151	Pengadilan Negeri Buntok	1
152	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	1
153	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	1
154	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	1
155	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	1
P	Pengadilan Tinggi Pontianak	
156	Pengadilan Negeri Singkawang	1
157	Pengadilan Negeri Mempawah	1

158	Pengadilan Negeri Ketapang	1
159	Pengadilan Negeri Bengkayang	1
160	Pengadilan Negeri Ngabang	1
Q	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	
161	Pengadilan Negeri Samarinda	1
162	Pengadilan Negeri Balikpapan	1
163	Pengadilan Negeri Tenggarong	1
164	Pengadilan Negeri Tanah Grogot	1
165	Pengadilan Negeri Tanjung Redeb	1
166	Pengadilan Negeri Sangatta	1
167	Pengadilan Negeri Bontang	1
168	Pengadilan Negeri Kutai Barat	1
169	Pengadilan Negeri Penajam	1
R	Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara	
170	Pengadilan Negeri Nunukan	1
171	Pengadilan Negeri Malinau	1
S	Pengadilan Tinggi Makassar	
172	Pengadilan Negeri Makassar	1
173	Pengadilan Negeri Watampone	1
174	Pengadilan Negeri Sungguminasa	1
175	Pengadilan Negeri Sengkang	1
176	Pengadilan Negeri Bulukumba	1
177	Pengadilan Negeri Makale	1
178	Pengadilan Negeri Palopo	1
179	Pengadilan Negeri Pare-Pare	1
180	Pengadilan Negeri Bantaeng	1
181	Pengadilan Negeri Watansoppeng	1
182	Pengadilan Negeri Enrekang	1
183	Pengadilan Negeri Pangkajene	1
184	Pengadilan Negeri Takalar	1
185	Pengadilan Negeri Selayar	1
186	Pengadilan Negeri Jeneponto	1
187	Pengadilan Negeri Barru	1
188	Pengadilan Negeri Pinrang	1
189	Pengadilan Negeri Masamba	1
190	Pengadilan Negeri Malili	1
T	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	
191	Pengadilan Negeri Toli-Toli	1
192	Pengadilan Negeri Buol	1
U	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara	
193	Pengadilan Negeri Kolaka	1

194	Pengadilan Negeri Bau-Bau	1
195	Pengadilan Negeri Raha	1
V	Pengadilan Tinggi Manado	
196	Pengadilan Negeri Bitung	1
197	Pengadilan Negeri Tahuna	1
198	Pengadilan Negeri Amurang	1
199	Pengadilan Negeri Airmadidi	1
200	Pengadilan Negeri Melonguane	1
W	Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat	
201	Pengadilan Negeri Mamuju	1
202	Pengadilan Negeri Polewali	1
203	Pengadilan Negeri Majene	1
204	Pengadilan Negeri Pasangkayu	1
X	Pengadilan Tinggi Denpasar	
205	Pengadilan Negeri Bangli	1
Y	Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat	
206	Pengadilan Negeri Sumbawa Besar	1
207	Pengadilan Negeri Raba Bima	1
208	Pengadilan Negeri Dompu	1
Z	Pengadilan Tinggi Kupang	
209	Pengadilan Negeri Atambua	1
210	Pengadilan Negeri Ende	1
211	Pengadilan Negeri Larantuka	1
212	Pengadilan Negeri So-E	1
213	Pengadilan Negeri Maumere	1
214	Pengadilan Negeri Ruteng	1
215	Pengadilan Negeri Kefamenanu	1
216	Pengadilan Negeri Waikabubak	1
217	Pengadilan Negeri Bajawa	1
218	Pengadilan Negeri Kalabahi	1
219	Pengadilan Negeri Lembata	1
220	Pengadilan Negeri Labuan Bajo	1
221	Pengadilan Negeri Oelamasi	1
AA	Pengadilan Tinggi Ambon	
222	Pengadilan Negeri Masohi	1
223	Pengadilan Negeri Saumlaki	1
224	Pengadilan Negeri Namlea	1
225	Pengadilan Negeri Dobo	1
226	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	1
227	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	1
AB	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	

228	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	1
229	Pengadilan Negeri Soa-Sio	1
230	Pengadilan Negeri Labuha	1
231	Pengadilan Negeri Tobelo	1
232	Pengadilan Negeri Sanana	1
233	Pengadilan Negeri Bobong	1
AC	Pengadilan Tinggi Jayapura	
234	Pengadilan Negeri Jayapura	1
235	Pengadilan Negeri Merauke	1
236	Pengadilan Negeri Biak	1
237	Pengadilan Negeri Nabire	1
238	Pengadilan Negeri Serui	1
239	Pengadilan Negeri Timika	1
AD	Pengadilan Tinggi Papua Barat	
240	Pengadilan Negeri Manokwari	1
241	Pengadilan Negeri Sorong	1
242	Pengadilan Negeri Fak-Fak	1
243	Pengadilan Negeri Kaimana	1
AE	Mahkamah Syar'iyah Aceh	
244	Mahkamah Syar'iyah Sigli	1
245	Mahkamah Syar'iyah Bireuen	1
246	Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan	1
247	Mahkamah Syar'iyah Kutacane	1
248	Mahkamah Syar'iyah Idi	1
249	Mahkamah Syar'iyah Meulaboh	1
250	Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon	1
251	Mahkamah Syar'iyah Sinabang	1
252	Mahkamah Syar'iyah Singkil	1
253	Mahkamah Syar'iyah Calang	1
254	Mahkamah Syar'iyah Sabang	1
255	Mahkamah Syar'iyah Langsa	1
256	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue	1
257	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie	1
258	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam	1
AF	Pengadilan Tinggi Agama Medan	
259	Pengadilan Agama Medan	1
260	Pengadilan Agama Lubuk Pakam	1
261	Pengadilan Agama Rantau Prapat	1
262	Pengadilan Agama Kisaran	1
263	Pengadilan Agama Stabat	1
264	Pengadilan Agama Simalungun	1

265	Pengadilan Agama Pandan	1
266	Pengadilan Agama Tarutung	1
267	Pengadilan Agama Kabanjahe	1
268	Pengadilan Agama Panyabungan	1
269	Pengadilan Agama Sibolga	1
270	Pengadilan Agama Binjai	1
271	Pengadilan Agama Tebing Tinggi	1
272	Pengadilan Agama Padang Sidempuan	1
273	Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan	1
274	Pengadilan Agama Sibuhuan	1
AG	Pengadilan Tinggi Agama Padang	
275	Pengadilan Agama Batusangkar	1
276	Pengadilan Agama Pariaman	1
277	Pengadilan Agama Bukittinggi	1
278	Pengadilan Agama Tanjung Pati	1
279	Pengadilan Agama Painan	1
280	Pengadilan Agama Koto Baru	1
281	Pengadilan Agama Sijunjung	1
282	Pengadilan Agama Maninjau	1
283	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	1
284	Pengadilan Agama Muara Labuh	1
285	Pengadilan Agama Sawahlunto	1
286	Pengadilan Agama Padang Panjang	1
287	Pengadilan Agama Pulau Punjung	1
AH	Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru	
288	Pengadilan Agama Rengat	1
289	Pengadilan Agama Bangkinang	1
290	Pengadilan Agama Pasir Pangaraian	1
291	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	1
292	Pengadilan Agama Bengkalis	1
293	Pengadilan Agama Tembilahan	1
294	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	1
AI	Pengadilan Tinggi Agama Jambi	
295	Pengadilan Agama Muara Bulian	1
296	Pengadilan Agama Kuala Tungkal	1
297	Pengadilan Agama Sarolangun	1
298	Pengadilan Agama Muara Tebo	1
299	Pengadilan Agama Sungai Penuh	1
AJ	Pengadilan Tinggi Agama Palembang	
300	Pengadilan Agama Muara Enim	1
301	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	1

302	Pengadilan Agama Lahat	1
303	Pengadilan Agama Sekayu	1
304	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	1
305	Pengadilan Agama Martapura	1
306	Pengadilan Agama Muaradua	1
AK	Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung	
307	Pengadilan Agama Mentok	1
AL	Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau	
308	Pengadilan Agama Tanjung Pinang	1
309	Pengadilan Agama Batam	1
310	Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun	1
311	Pengadilan Agama Natuna	1
312	Pengadilan Agama Dabo Singkep	1
313	Pengadilan Agama Tarempa	1
AM	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	
314	Pengadilan Agama Lebong	1
315	Pengadilan Agama Bintuhan	1
AN	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	
316	Pengadilan Agama Kalianda	1
317	Pengadilan Agama Gunung Sugih	1
318	Pengadilan Agama Kotabumi	1
319	Pengadilan Agama Krui	1
320	Pengadilan Agama Tulang Bawang	1
321	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	1
322	Pengadilan Agama Pringsewu	1
323	Pengadilan Agama Mesuji	1
324	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	1
325	Pengadilan Agama Sukadana	1
AO	Pengadilan Tinggi Agama Banten	
326	Pengadilan Tinggi Agama Banten	1
327	Pengadilan Agama Tigaraksa	1
328	Pengadilan Agama Serang	1
329	Pengadilan Agama Rangkasbitung	1
330	Pengadilan Agama Cilegon	1
AP	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	
331	Pengadilan Agama Jakarta Barat	1
332	Pengadilan Agama Jakarta Timur	1
AQ	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	
333	Pengadilan Tinggi Agama Bandung	1
334	Pengadilan Agama Tasikmalaya	1
335	Pengadilan Agama Ciamis	1

336	Pengadilan Agama Kuningan	1
337	Pengadilan Agama Indramayu	1
338	Pengadilan Agama Depok	1
339	Pengadilan Agama Cibinong	1
340	Pengadilan Agama Cibadak	1
341	Pengadilan Agama Purwakarta	1
342	Pengadilan Agama Sukabumi	1
343	Pengadilan Agama Cirebon	1
344	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya	1
345	Pengadilan Agama Banjar	1
346	Pengadilan Agama Soreang	1
AR	Pengadilan Tinggi Agama Semarang	
347	Pengadilan Agama Cilacap	1
348	Pengadilan Agama Banjarnegara	1
349	Pengadilan Agama Wonosobo	1
350	Pengadilan Agama Pemasang	1
351	Pengadilan Agama Brebes	1
352	Pengadilan Agama Pekalongan	1
353	Pengadilan Agama Kebumen	1
354	Pengadilan Agama Surakarta	1
355	Pengadilan Agama Slawi	1
356	Pengadilan Agama Pati	1
357	Pengadilan Agama Purbalingga	1
358	Pengadilan Agama Jepara	1
359	Pengadilan Agama Kajen	1
360	Pengadilan Agama Banyumas	1
361	Pengadilan Agama Purworejo	1
362	Pengadilan Agama Rembang	1
363	Pengadilan Agama Kudus	1
364	Pengadilan Agama Demak	1
365	Pengadilan Agama Ambarawa	1
366	Pengadilan Agama Temanggung	1
367	Pengadilan Agama Tegal	1
368	Pengadilan Agama Magelang	1
AS	Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta	
369	Pengadilan Agama Wates	1
370	Pengadilan Agama Wonosari	1
AT	Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	
371	Pengadilan Agama Tulungagung	1
372	Pengadilan Agama Blitar	1
373	Pengadilan Agama Lumajang	1

374	Pengadilan Agama Jember	1
375	Pengadilan Agama Banyuwangi	1
376	Pengadilan Agama Bojonegoro	1
377	Pengadilan Agama Tuban	1
378	Pengadilan Agama Lamongan	1
379	Pengadilan Agama Kota Malang	1
380	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	1
381	Pengadilan Agama Ponorogo	1
382	Pengadilan Agama Trenggalek	1
383	Pengadilan Agama Bondowoso	1
384	Pengadilan Agama Kraksaan	1
385	Pengadilan Agama Bangil	1
386	Pengadilan Agama Mojokerto	1
387	Pengadilan Agama Nganjuk	1
388	Pengadilan Agama Kabupaten Madiun	1
389	Pengadilan Agama Bangkalan	1
390	Pengadilan Agama Sumenep	1
391	Pengadilan Agama Pacitan	1
392	Pengadilan Agama Sampang	1
393	Pengadilan Agama Pamekasan	1
394	Pengadilan Agama Kota Kediri	1
395	Pengadilan Agama Probolinggo	1
396	Pengadilan Agama Bawean	1
397	Pengadilan Agama Kota Madiun	1
AU	Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin	
398	Pengadilan Agama Barabai	1
399	Pengadilan Agama Amuntai	1
400	Pengadilan Agama Tanjung	1
401	Pengadilan Agama Kotabaru	1
402	Pengadilan Agama Batu Licin	1
403	Pengadilan Agama Rantau	1
404	Pengadilan Agama Kandangan	1
405	Pengadilan Agama Negara	1
AV	Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya	
406	Pengadilan Agama Palangkaraya	1
407	Pengadilan Agama Pangkalan Bun	1
408	Pengadilan Agama Sampit	1
409	Pengadilan Agama Kuala Kapuas	1
410	Pengadilan Agama Buntok	1
411	Pengadilan Agama Muara Teweh	1
412	Pengadilan Agama Sukamara	1

413	Pengadilan Agama Kuala Pembuang	1
414	Pengadilan Agama Kasongan	1
415	Pengadilan Agama Tamiyang Layang	1
416	Pengadilan Agama Pulang Pisau	1
417	Pengadilan Agama Kuala Kurun	1
AW	Pengadilan Tinggi Agama Pontianak	
418	Pengadilan Agama Pontianak	1
419	Pengadilan Agama Sambas	1
420	Pengadilan Agama Sanggau	1
421	Pengadilan Agama Ketapang	1
422	Pengadilan Agama Sintang	1
423	Pengadilan Agama Putusibau	1
424	Pengadilan Agama Bengkayang	1
AX	Pengadilan Tinggi Agama Samarinda	
425	Pengadilan Agama Samarinda	1
426	Pengadilan Agama Tenggarong	1
427	Pengadilan Agama Tanah Grogot	1
428	Pengadilan Agama Tanjung Redep	1
429	Pengadilan Agama Sangatta	1
430	Pengadilan Agama Penajam	1
AY	Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara	
431	Pengadilan Agama Tanjung Selor	1
432	Pengadilan Agama Nunukan	1
AZ	Pengadilan Tinggi Agama Makassar	
433	Pengadilan Agama Sengkang	1
434	Pengadilan Agama Maros	1
435	Pengadilan Agama Watansoppeng	1
436	Pengadilan Agama Bulukumba	1
437	Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	1
438	Pengadilan Agama Selayar	1
439	Pengadilan Agama Bantaeng	1
440	Pengadilan Agama Jeneponto	1
441	Pengadilan Agama Takalar	1
442	Pengadilan Agama Pangkajene	1
443	Pengadilan Agama Barru	1
444	Pengadilan Agama Enrekang	1
445	Pengadilan Agama Belopa	1
446	Pengadilan Agama Malili	1
AAA	Pengadilan Tinggi Agama Palu	
447	Pengadilan Agama Poso	1
448	Pengadilan Agama Toli-toli	1

449	Pengadilan Agama Buol	1
450	Pengadilan Agama Banggai	1
451	Pengadilan Agama Ampana	1
AAB	Pengadilan Tinggi Agama Kendari	
452	Pengadilan Agama Kolaka	1
453	Pengadilan Agama Raha	1
454	Pengadilan Agama Pasarwajo	1
455	Pengadilan Agama Andoolo	1
456	Pengadilan Agama Bau-Bau	1
AAC	Pengadilan Tinggi Agama Manado	
457	Pengadilan Agama Manado	1
458	Pengadilan Agama Tahuna	1
459	Pengadilan Agama Amurang	1
460	Pengadilan Agama Bitung	1
461	Pengadilan Agama Lolak	1
462	Pengadilan Agama Bolaang Uki	1
463	Pengadilan Agama Boroko	1
464	Pengadilan Agama Tutuyan	1
AAD	Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo	
465	Pengadilan Agama Gorontalo	1
466	Pengadilan Agama Tilamuta	1
467	Pengadilan Agama Suwawa	1
468	Pengadilan Agama Kwandang	1
AAE	Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat	
469	Pengadilan Agama Mamuju	1
470	Pengadilan Agama Polewali	1
471	Pengadilan Agama Majene	1
472	Pengadilan Agama Pasangkayu	1
AAF	Pengadilan Tinggi Agama Mataram	
473	Pengadilan Agama Giri Menang	1
AAG	Pengadilan Tinggi Agama Bali	
474	Pengadilan Agama Bangli	1
475	Pengadilan Agama Badung	1
476	Pengadilan Agama Singaraja	1
477	Pengadilan Agama Tabanan	1
478	Pengadilan Agama Klungkung	1
479	Pengadilan Agama Gianyar	1
480	Pengadilan Agama Karangasem	1
481	Pengadilan Agama Negara	1
AAH	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	
482	Pengadilan Tinggi Agama Kupang	1

483	Pengadilan Agama Kupang	1
484	Pengadilan Agama So'e	1
485	Pengadilan Agama Kefamenanu	1
486	Pengadilan Agama Atambua	1
487	Pengadilan Agama Kalabahi	1
488	Pengadilan Agama Larantuka	1
489	Pengadilan Agama Maumere	1
490	Pengadilan Agama Ende	1
491	Pengadilan Agama Bajawa	1
492	Pengadilan Agama Ruteng	1
493	Pengadilan Agama Waingapu	1
494	Pengadilan Agama Labuan Bajo	1
AAI	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	
495	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	1
496	Pengadilan Agama Ambon	1
497	Pengadilan Agama Masohi	1
498	Pengadilan Agama Tual	1
499	Pengadilan Agama Namlea	1
AAJ	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	
500	Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	1
501	Pengadilan Agama Labuha	1
502	Pengadilan Agama Morotai	1
503	Pengadilan Agama Soa Sio	1
AAK	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	
504	Pengadilan Agama Jayapura	1
505	Pengadilan Agama Merauke	1
506	Pengadilan Agama Sentani	1
507	Pengadilan Agama Nabire	1
508	Pengadilan Agama Paniai	1
509	Pengadilan Agama Serui	1
510	Pengadilan Agama Biak	1
511	Pengadilan Agama Mimika	1
512	Pengadilan Agama Arso	1
AAL	Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat	
513	Pengadilan Agama Manokwari	1
514	Pengadilan Agama Fak-Fak	1
515	Pengadilan Agama Sorong	1
516	Pengadilan Agama Kaimana	1
AAM	Pengadilan Militer Utama Jakarta	
517	Pengadilan Militer Utama Jakarta	1
AAN	Pengadilan Militer Tinggi I Medan	

518	Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh	1
519	Pengadilan Militer I - 02 Medan	1
520	Pengadilan Militer I - 03 Padang	1
521	Pengadilan Militer I - 05 Pontianak	1
522	Pengadilan Militer I - 06 Banjarmasin	1
523	Pengadilan Militer I - 07 Balikpapan	1
AAO	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	
524	Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta	1
525	Pengadilan Militer II - 08 Jakarta	1
526	Pengadilan Militer II - 09 Bandung	1
527	Pengadilan Militer II - 10 Semarang	1
528	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	1
AAP	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	
529	Pengadilan Militer III - 12 Surabaya	1
530	Pengadilan Militer III - 13 Madiun	1
531	Pengadilan Militer III - 15 Kupang	1
532	Pengadilan Militer III - 16 Makassar	1
533	Pengadilan Militer III - 17 Manado	1
534	Pengadilan Militer III - 19 Jayapura	1
AAQ	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	
535	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	1
536	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	1
537	Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang	1
AAR	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	
538	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	1
539	Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi	1
AAS	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	
540	Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	1
AAT	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	
541	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	1
AAU	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin	
542	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya	1
AAV	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	
543	Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar	1
AAW	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	
544	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	1
545	Pengadilan Tata Usaha Negara Manado	1
546	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	1
547	Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	1
548	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	1
AAX	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	

549	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	1
550	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	1
TOTAL KEBUTUHAN FORMASI		567

DAFTAR PROGRAM STUDI BIDANG PENDIDIKAN EKONOMI, KEUANGAN, AKUNTANSI,
MANAJEMEN, ADMINISTRASI, DAN HUKUM YANG SESUAI BIDANG TUGAS JABATAN
FUNGSIONAL PERBENDAHARAAN

No	Nama Bidang	Program Studi
1.	Ekonomi	Ekonomi
		Ekonomi Pembangunan
		Ekonomi Syariah
		Keuangan Islam
		Keuangan Publik
		Ekonomi Sumber Daya
		Ekonomi Sumber Kelautan
		Ekonomi Terapan
		Ekonomi Koperasi
		Keuangan Mikro
		Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
		Ekonomi, Keuangan dan Perbankan
		Ekonomi dan Keuangan Islam
		Pendidikan Ekonomi
2.	Manajemen	Manajemen
		Ilmu atau Sains Manajemen
		Manajemen Inovasi
		Manajemen Organisasi
		Manajemen Pajak atau Administrasi Pajak
		Manajemen Pendidikan Tinggi
		Manajemen Sumber Daya Manusia
		Manajemen Teknologi
		Sistem Informasi Manajemen
		Manajemen Bisnis Internasional
3.	Akuntansi	Akuntansi
		Ilmu atau Sains Akuntansi
		Akuntansi Sektor Publik
		Akuntansi Keuangan Publik
		Akuntansi Perpajakan
		Akuntansi Syariah
		Komputerisasi Akuntansi
		Akuntansi Manajerial
		Akuntansi Bisnis

No	Nama Bidang	Program Studi
		Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
		Akuntansi Manajemen Pemerintahan
		Pendidikan Akuntansi
4.	Keuangan	Perbankan
		Perpajakan
		Kebendaharaan Negara
		Kepabeanan dan Cukai
		Pengurusan Piutang dan Lelang Negara / Manajemen Aset
		Manajemen Keuangan Negara
		Manajemen Aset Publik
		Akuntansi Sektor Publik
		Penilai
		Aktuaria
5	Administrasi	Ilmu Administrasi
		Administrasi
		Administrasi Bisnis
		Administrasi Niaga
		Administrasi Negara
		Administrasi Publik
		Administrasi Perkantoran
6	Hukum	Hukum
		Hukum Ekonomi Islam
		Hukum Islam
		Hukum Ekonomi Syariah
		Hukum Syariah
		Hukum Perdata
		Hukum Tata Negara
		Hukum Administrasi Negara
		Hukum Publik
		Hukum Litigasi
		Hukum Kesehatan
		Kenotariatan
		Hukum dan Pembangunan
		Hukum Agraria dan Pertanahan
		Hukum Bisnis
		Hukum Hak Kekayaan Intelektual
		Hukum Internasional

FORMAT SURAT KETERANGAN

(KOP SURAT)
SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Yang bersangkutan :

- a. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- c. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
- d. Tidak sedang menjalankan tugas belajar;
- e. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara; dan
- f. Tidak mengajukan permohonan pindah satuan kerja.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 1)
..... 2)

..... 3)
NIP. 4)

Catatan: Poin a s.d. f **wajib** tercantum dalam surat keterangan. Apabila ada poin yang tidak termuat atau diganti maka dianggap tidak sah dan digugurkan.

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat keterangan;
- 2) Diisi dengan jabatan Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan) yang membuat surat keterangan;
- 3) Diisi dengan nama pejabat Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan) yang membuat surat keterangan;
- 4) Diisi dengan NIP pejabat Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan) yang membuat surat keterangan.

FORMAT SURAT PERNYATAAN

(KOP SURAT)
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

telah memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN selama paling singkat 2 (dua) tahun/4 (empat) tahun)*, selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Penugasan	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan
1.	1)	2)	3)
2.			
3.			
4.	dst.		

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 4)
..... 5)

..... 6)
NIP. 7)

*coret yang tidak perlu
(minimal 4 (empat) tahun dalam hal peserta memiliki kualifikasi pendidikan selain bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, manajemen, administrasi, dan hukum)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan tahun penugasan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- 2) Diisi dengan uraian penugasan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- 3) Diisi dengan nomor dan tanggal SK penunjukan/pengangkatan/penugasan PNS dalam pengelolaan keuangan APBN;
- 4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat pernyataan;
- 5) Diisi dengan jabatan Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan) yang membuat surat pernyataan;
- 6) Diisi dengan nama pejabat Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan) yang membuat surat pernyataan;
- 7) Diisi dengan NIP pejabat Pimpinan Satuan Kerja (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Ketua/Kepala Pengadilan) yang membuat surat pernyataan.

FORMAT FORMULIR PENDAFTARAAN ADMIN SATKER E-JAFUNG

(KOP SURAT)

Formulir Pendaftaran Akun
Admin Satker *e-Jafung*

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Kode>Nama Satker :
Nomor HP :
Alamat *email* Aktif :
Nomor Induk Kepegawaian :

Dengan menandatangani formulir isian ini, berarti saya telah memahami dan akan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Mengetahui,
..... 1)
(*minimal eselon III dan dicap basah*)

..... (4)
Pemohon,

..... 2)
NIP. 3)

..... 5)
NIP. 6)

*Diisi oleh petugas

Tiket ID	:
Tanggal	:
Petugas	:

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomenklatur jabatan penanda tangan;
- 2) Diisi dengan nama pejabat penanda tangan;
- 3) Diisi dengan NIP pejabat penanda tangan;
- 4) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat permohonan;
- 5) Diisi dengan nama pemohon;
- 6) Diisi dengan NIP pemohon.